

Penganggaran di Organisasi Keagamaan: Studi Kasus pada Paroki Katedral Keuskupan Padang

Maria Selta Kurnia Murni Gulo^{1*}, Deviani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi; mariaseltakurnia@gmail.com

Tanggal Masuk:

13 Agustus 2024

Tanggal Revisi:

12 November 2024

Tanggal Diterima:

26 Maret 2025

Keywords: *Management; Budgeting; Parishes; Religious Organization.*

How to cite (APA 6th style)

Gulo, M. S. K. M., & Deviani (2025). Penganggaran di Organisasi Keagamaan: Studi Kasus pada Paroki Katedral Keuskupan Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (2), 498-8505.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i2.2149>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This research was conducted to understand the budgeting and control processes in religious organizations, specifically the Cathedral Parish of the Padang Diocese. The method used in this research is qualitative through observation, interviews, and documentation. The research instrument is the researcher themselves. The research findings reveal that the budgeting process at the Cathedral Parish of Padang is still very simple and lacks standardized regulations. Budget planning is carried out at the beginning of the period through sections of each field. Control is conducted by supervising each activity, preparing accountability reports through the field section coordinators, and evaluating at the end of the period.

PENDAHULUAN

Lembaga keagamaan muncul dan memegang peran strategis dalam eskalasi kesejahteraan masyarakat secara kontekstual diantaranya bidang pendidikan, *Healthy*, pemberdayaan ekonomi, social budaya dan advokasi hukum. Jika lembaga keagamaan dapat memanfaatkannya dengan baik maka munculnya organisasi keagamaan dapat menyentuh sisi kehidupan secara fisik dan secara spiritual (Patty, M & Leiwakabesy, A. 2021).

Bertambah detail dan lengkap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pelaksana tentunya membutuhkan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, pentingnya pengetahuan tentang akuntansi, anggaran dan keuangan tidak hanya kegiatan yang dilakukan perusahaan, perdagangan atau sejenisnya tetapi menjadi kebutuhan bagi organisasi nirlaba untuk dapat memahami, mengelola dan melaksanakan kegiatan akuntansi.

Anggaran adalah dasar pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif (Sasongko, 2010). Pembuatan anggaran organisasi non-laba sangat *urgent* karena sumber dananya bergantung pada donatur sehingga manajer operasi nirlaba harus secara ketat mengikuti rencana yang dibuat sesuai anggaran.

Anggaran dibentuk sebagai acuan yang akan dituangkan dalam bentuk numerik yang menggambarkan kegiatan atau program kerja suatu lembaga.

Beberapa studi menunjukkan urgensi akuntansi keagamaan sebagai system yang digunakan untuk mengumpulkan dan memanipulasi informasi kemudian dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Salah satu organisasi keagamaan adalah organisasi gereja. Booth, 1993 menyatakan bahwa gereja adalah “kasus ekstrim” untuk mempelajari praktik akuntansi. Dalam organisasi seperti itu, akuntansi tidak berperan penting seperti di entitas komersial. Oleh karena itu, memahami akuntansi sebagai praktik yang ada di gereja-gereja merupakan cara yang bermanfaat untuk menambah penjelasan tentang pentingnya akuntansi dalam organisasi.

Alasan penting melakukan studi penganggaran pada paroki disebabkan karena paroki diklasifikasikan sebagai organisasi nirlaba “murni” karena pendapatannya diperoleh dari kontribusi dan penggalangan dana para anggota, tidak menjalankan bisnis untuk menghasilkan pendapatan, selain tinggal di wilayah geografis yang sama juga memiliki nilai dan keyakinan normative yang sama (Kluvers, n.d.-a). Tidak banyak penelitian yang menjelaskan tentang praktik akuntansi dalam organisasi Gereja di Indonesia. Oleh karena itu, isu seputar penganggaran di Gereja Katolik menarik untuk di eksplorasi. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penganggaran di paroki katedral padang keuskupan padang.

REVIU LITERATUR

Teori legitimasi

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling & Pfeffer (1975). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma masyarakat dimana perusahaan berada Purwanto, A. (2011).

Deegan *et al.*, (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Organisasi dikatakan mendapat legitimasi dari masyarakat jika dianggap beroperasi dan memiliki tujuan yang sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat.

Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian,2010). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, 2005 dalam (Sari et al., 2018), akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk dari pertanggungjawaban dari suatu entitas terhadap tanggungjawab yang diperoleh, khususnya dalam mengelola keuangan suatu entitas atau organisasi yang biasanya digunakan oleh pengguna informasi keuangan.

Akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam suatu organisasi atau lembaga karena pengaruh besar terhadap penilaian kinerja suatu organisasi dimana pengelolaan yang dilakukan secara transparan akan berdampak baik pada kepercayaan pihak internal dan eksternal

organisasi. Hubungan akuntabilitas melibatkan dua pihak, pemberi wewenang (tanggungjawab) dan pihak penerimanya.

Penganggaran (*budgeting*)

Anggaran (*budgeting*) yaitu dasar atau asas pada kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam kurun waktu tertentu yang tertuang secara konkrit dan kuantitatif. Berdasarkan gagasan Hongren (2000) dalam buku anggaran, mengatakan bahwa “*A budget is a quantitative description of a plan that has been prepared by management for a certain period of time and is a tool for coordination and regulation of the specified plan*”.

Keuskupan dan Paroki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Keuskupan adalah wilayah atau daerah yang menjadi wewenang uskup. Dalam Gereja Katolik, Keuskupan atau dioses menjadi suatu istilah yang digunakan pada beberapa wilayah atau yurisdiksi gerejawi, salah satunya bagi beberapa denominasi Kristen yang diatur oleh seorang uskup. Pada dasarnya, suatu keuskupan dibagi menjadi beberapa wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang disebut paroki, dan dipimpin oleh seorang imam.

Paroki merupakan suatu institusi hukum gerejani dan umumnya juga badan hukum suatu bangsa (*kerk en armenbestuur*), Dibangun, ditiadakan atau ditukar oleh uskup setelah mendapatkan pertimbangan dewan imam. Paroki merupakan penganut beriman katolik, yang terbentuk secara permanen dan tetap didalam suatu keuskupan dan pelayanan pastoralnya yang di amanahkan kepada pastor.

Pengelolaan Keuangan Paroki

Keuangan Paroki adalah dana dan materi Paroki yang berasal dari persembahan umat, sumbangan dan kegiatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan gereja yang berlaku, dimana tanggungjawab penggunaan dan pengelolannya langsung dipegang oleh Pastor Kepala Paroki, serta penggunaannya direalisasikan dari Pastor Kepala Paroki dengan bantuan dan kerjasama dari Bendahara Paroki (Mahsun dkk,2007).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan sekunder, data primer yang digunakan adalah wawancara secara langsung kepada pihak yang mengelola anggaran paroki sedangkan data sekunder mengenai sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, kegiatan organisasi dan program kegiatan paroki. Instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri . Adapun teknik pengumpulan data utama pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur secara terbuka dan mendalam.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Anggaran Paroki Katedral Keuskupan Padang

Proses penganggaran

Pengelolaan anggaran berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan dan pengelolaan keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, paroki memperoleh dana dari sumbangan anggota dan donatur. Hal tersebut sejalan dengan diungkapkan oleh Pastor Kepala Paroki (Pastor Mateus Tatebburuk) sebagai berikut:

“Kalo kita di paroki ketika ada pembangunan, penggalangan dana eksternal ada dilakukan untuk meminta partisipasi umat tujuannya agar menyadarkan mereka bahwa yang dibuat atau dibangun itu adalah milik Bersama”

Sumber keuangan paroki Katedral Padang murni berasal dari partisipasi umat itu sendiri. Umat diajak untuk terlibat dan mendukung setiap program kerja yang dilaksanakan di Paroki. Pengelolaan anggaran Paroki Katedral Keuskupan Padang merupakan wewenang dari Pastor Kepala Paroki dibantu oleh Dewan Paroki Pastoral dan Dewan Keuangan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Paroki Katedral (Pastor Mateus) menyatakan bahwa:

“Diparoki ini kita tidak seperti dipemerintah atau organisasi lain ya. kita di paroki keterlibatan itu lebih ke DPP harian. Kita tidak melibatkan banyak orang. Ketika seksi-seksi mengajukan proposal kita membahasnya hanya intern saja diparoki tidak melibatkan orang luar”.

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa proses penganggaran pada Paroki Katedral hanya sebatas penganggaran yang sederhana, berkala serta sistematis yang dilaksanakan setiap melaksanakan kegiatan dan tidak mempunyai standar yang baku. Selain itu, keputusan tertinggi berada ditangan Pastor Kepala Paroki.

Partisipasi dalam proses anggaran.

Dalam pengelolaan anggaran, pastor kepala paroki bersama Dewan Pastoral Paroki memiliki asas bukan hanya sebagai pengelola melainkan melakukan control atau monitoring pada pengelolaan anggaran sehingga beberapa kekeliruan dapat diminimalisir. Hal ini sesuai pernyataan dari wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Sebenarnya kita wewenang pastor paroki itu ada batas-batasnya. Bersama dengan DPP, pastor paroki itu tidak seluruhnya diberikan ke awam atau keanggota DPP. Karna yang sifatnya pastoral itu lebih pada soal kebijakan pastor paroki sendiri. Maka DPP dalam kebijakan penganggaran lebih pada sifatnya konsultatif. Artinya pastor meminta pendapat orang, ini ada pembangunan ini, ada kegiatan ini bagaimana pendapat bapak/ibu atau DPP lah, apakah ini bisa kita setuju atau tidak. Jadi kalau disana tidak menemukan keputusan atau kesepakatan maka pastor paroki punya otoritasnya untuk mengatakan ini kita jalankan. Artinya pendelegasian wewenang itu tidak seratus persen diberikan begitu saja tetapi tetap pada control pastor paroki. Karna pastor paroki itu adalah wakil uskup jadi dia akan mempertanggungjawabkan parokinya ke keuskupan”.

Dominasi pastor paroki dalam proses penganggaran mempengaruhi beberapa hal yaitu *pertama*, meningkatkan sekularisasi dalam masyarakat dan organisasi keagamaan. *Kedua*, budaya katolik tradisional, pengambilan keputusan merupakan hierarki dan ditingkat paroki oleh pastor paroki. *Ketiga*, pastor paroki memilah-milah fungsi sekuler dalam penganggaran dan membatasi pengaruh sekuler terhadap diri sendiri dan dewan pastoral.

Pengendalian pada anggaran

Pengendalian yang dilakukan pada paroki katedral padang adalah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan, laporan pertanggungjawaban melalui coordinator seksi bidang dan evaluasi pada akhir periode. Sebagaimana di kemukakan oleh Pastor Kepala Paroki (Pastor Matheus) sebagai berikut:

“Kita di paroki mempercayakan ke orang saja lalu seksi-seksinya sudah melaksanakan programnya, kita monitor dan bulan November kita melaksanakan evaluasi apakah program kerja berjalan atau tidak dan apa saja hambatannya serta tindak lanjut kedepan seperti apa”

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pada Paroki Katedral Padang dilakukan monitor agar kegiatan tersebut sesuai dengan yang direncanakan serta dilakukan evaluasi sehingga dapat menjadi acuan pada periode anggaran selanjutnya.

Pembahasan

Pengelolaan Anggaran Paroki Katedral Masih Sederhana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paroki Katedral Padang memiliki jangka waktu anggaran satu tahun. ini membatasi kemungkinan pengembangan rencana keuangan untuk jangka waktu yang lebih lama dan akibatnya membatasi anggaran sebagai dokumen perencanaan.

Pengelolaan anggaran sederhana paroki Katedral Padang efektif dan akuntabel dengan menjaga keterbukaan dan melibatkan umat, peningkatan keterampilan dan penggunaan teknologi sederhana dapat membantu mengurangi resiko dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, keterbukaan dan kepercayaan serta kesesuaian dengan nilai dapat mempertahankan legitimasi dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Paroki Katedral Padang (Akuntabilitas)

Dari temuan diatas menunjukkan bahwa wujud akuntabilitas dan kejelasan kepada umat selaku pemangku kepentingan paroki katedral adalah dengan memberikan pelaporan keuangan secara umum diakhir periode anggaran. Perbedaan pada segi akuntabilitas hanya bisa dikelola oleh pengurus tanpa diketahui oleh umat, hal ini berdasarkan prinsip yang diterapkan oleh pastor Paroki bahwa sesuatu yang telah diberikan kepada gereja adalah milik gereja. Selain hal tersebut, bentuk akuntabilitas paroki juga terlihat kepada penyelesaian setiap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh pihak keuskupan. Hal ini dimaksudkan bahwa organisasi hendaknya mampu memberi kebahagiaan dimasyarakat sekitar.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Paroki Katedral Padang dalam kaitannya dengan legitimacy mencakup aspek penting yang memastikan transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan umat serta masyarakat luas. Paroki harus memastikan bahwa pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Paroki Katedral Padang serta memperhatikan etika dan integritas merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan dengan baik sesuai harapan umat.

Wujud Kepercayaan Umat Paroki Katedral Padang Tidak Menuntut Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)

Pertanggungjawaban realisasi dana bahwa ketika dana telah digunakan tidak ada transparansi ke umat hal ini disebabkan nilai-nilai kepercayaan yang ditanamkan kepada umat Paroki Katedral Padang. Pastor paroki mengajarkan kepada umat untuk memberi dengan sukarela dan ikhlas sesuai kemampuan Hal ini dijelaskan pada temuan peneliti bahwa umat dituntut untuk memberi dengan sukarela dan bukan paksaan sehingga tidak adanya tuntutan akuntabilitas setiap minggu digereja. Sesuai dengan pesan alkitab bahwa “Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kepercayaan umat juga terlihat

pada pola komunikasi yang baik antara umat dengan Dewan Pastoral Paroki ketika membutuhkan bantuan terkait permasalahan yang berkaitan dengan Paroki, umat dengan cepat menanggapi dan membantu terkhusus dalam hal pendanaan Paroki.

Teori legitimasi berargumen bahwa organisasi, termasuk Lembaga keagamaan salah satunya Paroki Katedral Padang, memperoleh dan mempertahankan legitimasi melalui kesesuaian tindakan mereka dengan norma, nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh umat.

Implikasi temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam konteks penerapan teori legitimasi dimana umat tidak mengetahui jumlah anggaran yang ada dalam paroki katedral, umat bertahan pada norma dan nilai-nilai yang telah ada tanpa adanya perubahan dan pembaruan serta kurangnya komunikasi serta keterikatan yang lebih antara umat dan paroki dalam penganggaran setiap program yang direncanakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara keseluruhan berdasarkan tahapan observasi dan wawancara yang dilakukan terungkap bahwa proses penganggaran yang dilakukan di Paroki Katedral Padang merupakan praktik akuntansi sederhana dan belum mengikuti standar akuntansi organisasi nirlaba yang berlaku. Hal ini tercermin pada seluruh aspek kegiatan yang mereka laksanakan melalui semangat gotong royong, kebersamaan dan kepercayaan antara satu dengan yang lain.

Saran

Penganggaran pada Paroki Katedral Padang masih perlu adanya regulasi yang tetap, peningkatan program kegiatan keagamaan, kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan ruanglingkup penelitian bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman, A. R., & Goddard, A. (1998). *An interpretive inquiry of accounting practices in religious organisations*. *Financial Accountability & Management*, 14(3), 183-201.
- Agyei-Mensah, B. K. (2016). *Accountability and internal control in religious organisations: a study of Methodist church Ghana*. *African Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 5(2), 95-112.
- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.
- Alouw, P. S., Awuy, R., Koagouw, H. U., Tandi, A. A., & Putong, I. H. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Organisasi Nirlaba. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5020-5727.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Dolle, B. P. S. (2018). *Prinsip Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Paroki (Studi Etnografi Inkulturatif Pada Gereja Katolik Lokal Di Larantuka)* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Ekasari, N., & Venusita, L. (2009). *Peranan Anggaran Partisipatif Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Manajerial Dikaitkan Dengan Budaya Organisasi Dan Hubungan Antarindividu Pada Organisasi*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 1(1), 78-88.
- Fitria, Y. (2017). Akuntabilitas pada organisasi religi; studi kasus masjid-masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 14(1), 38-45.
- Hauriasi, A., Van-Peursem, K., & Davey, H. (2016). Budget processes in the Anglican Church of Melanesia: an emergent ethnic identity. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(8), 1294-1319.

- Hoge, R., & Augustyn, B. (1997). Financial contributions to Catholic parishes: A nationwide study of determinants. *Review of religious research*, 46-60.
- Irvine, H. (2005). Balancing money and mission in a local church budget. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18(2), 211-237.
- Jamil, A. (2012). *Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta dalam Pemberdayaan Umat Katolik*. Harmoni, 11(1), 44-55.
- Jayanti, H., SINARWATI, N. K., Yuniarta, G. A., & AK, S. (2017). *Pengaruh Motivasi Dalam Penyusunan Anggaran Dan Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kegiatan Oleh Pengurus Kategorial (Studi Kasus pada Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) Patas, Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
- Junaidi, J. (2021). Kemandirian Gereja Menuju Gereja Yang Sejahtera. *Prosiding STT Sumatera Utara*, 1(1), 283-291.
- Keuskupanpadang.org. diakses 15 Februari 2024
- Kluvers, R. (2001). *Budgeting in Catholic parishes: an exploratory study*. Financial Accountability & Management, 17(1), 41-58.
- Mahardika, I. D. G. (2023). *Analisis Penerapan Akuntabilitas Keuangan Serta Transparansi Pada Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Paroki Kranggan* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Njobvu, E. N., Kaira, B., & Chowa, T. (2020). *Financial accountability and internal controls in religious organizations: A case study of Holy Spirit Catholic Parish*. The International Journal of Business Management and Technology, 4(3).
- Novarima, T. A., Ludigdo, U., & Prihatiningtias, Y. W. (2018). *Mengungkap Praktik Senjangan Anggaran Pada Organisasi Nirlaba: Badan Pengelola Dana Amanat (Studi Etnometodologi)*. Jurnal Akuntansi Aktual, 5(1), 63-75.
- Nurhidayah, N. (2019). *Penganggaran keuangan madrasah*. Jurnal Isema: Islamic Educational Management, 4(1), 133-146.
- Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta. 2019. Diakses 15 Oktober 2023.
- Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki (DPP) dan Badan Pengelola Keuangan dan Hara Benda Paroki (BPKHBP) Paroki Katedral St. Theresia Padang. 2024.
- Purwanto, A. (2011). Pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, terhadap corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 12-29.
- Putra, B., & Deviani, D. (2023). Pengaruh Kompetensi Amil dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Muzakki pada LAZISMU Payakumbuh. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(2), 707-717.
- Putri, N. M., Triyuwono, I., & Purwanti, L. (2023). Exploring budgetary accounting practices on the Jaton (Javanese Tondano) eid celebration tradition in Gorontalo. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 12(9), 327-337.
- REGINA, L. (2017). *Desain Model Pengelolaan Keuangan Gereja Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 45 (Studi Kasus Gmim Syaloom Suluun)* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Manado).
- Rukmana, E. (2020). *Pengelolaan Anggaran Dana (Budgeting) Dalam Meningkatkan Aktivitas Dakwah Oleh Pengurus Masjid Ar-Rahim Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Safitri, D. A., & Fidiana, F. (2015). Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pasar. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(4).

- Saputro, D. S. H., Riharjo, I. B. R., & Ardini, L. (2023). Dilema Etis Akuntabilitas dalam Keputusan Bisnis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 109-126.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 15(2), 45-56.
- Sasongko, C & Rumondang, Parulian. 2010. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiyani, C. A. (2016). *Evaluasi Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Gereja-Gereja di Rayon Bantul* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Sharma, U., & Frost, D. (2020, October). *Social capital and the budgeting process: a study of three organisations*. In *Accounting Forum* (Vol. 44, No. 4, pp. 376-397). Routledge.
- Sudaryanti, D. (2009). Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi di Indonesia. *TEMA*, 10(1), 58-76.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanto, I., Basalamah, S., & Rahim, S. (2019). Akuntabilitas Masjid: Studi Fenomenologi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Makassar. *Jurnal Economix*, 7(2), 26-35.
- Syafri, Harahap. 2001. *Budgeting peranggaran perencanaan lengkap: untuk membantu manajemen*. Jakarta:Raja Grafindo
- Tes Loe, K. S. (2020). *Tata Kelola Keuangan Gereja Paroki St. Agustinus Fatubenao Keuskupan Atambua* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Warastuti, Y., Susilawati, C., Butar-Butar, S., & Murniati, M. P. (2022). Studi Kualitatif Persepsi Pengurus Gereja Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis Isak 35. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1), 88-108.
- WISUDHA, D. P. (2008). *Penganggaran Gereja Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Gereja" Y"* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Yusuf, Muri. 2014. *Metodologi penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.